

BUKU I

RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan visi daerah “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi” tentunya akan fokus dalam peningkatan potensi dan pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap berkomitmen dalam memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan berbagai arah kebijakan sebagai bentuk respons dalam meminimalkan potensi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini merupakan bentuk nyata akan pentingnya kehadiran data lingkungan yang akurat untuk digunakan dalam pengambilan kebijakan serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. PROFIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

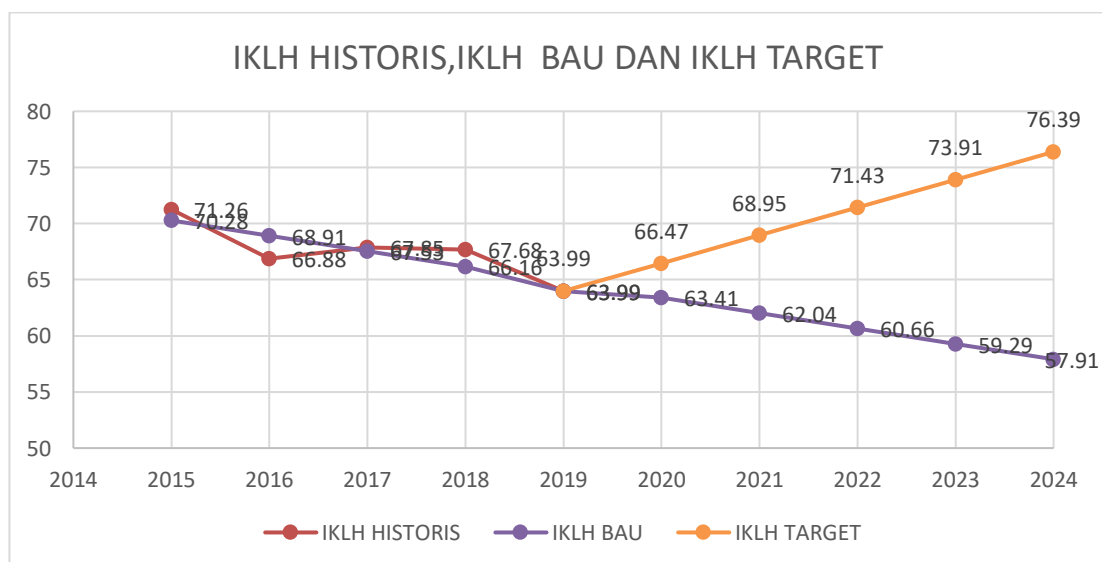
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten

dan 1 (satu) Kota. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas mencapai 81.725,23 km², Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,1% dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,9% dari luas total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami pertumbuhan pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.488.800 orang (Bangka Belitung dalam angka, 2020) dengan kepadatan penduduk 91 orang per Km².

III. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Gambaran pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergambarkan dalam indikator Indeks Kualitas Lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data historis IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang merupakan manifestasi dari pengelolaan terhadap kualitas air, tutupan lahan dan kualitas udara.



Gambar 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bangka Belitung

Jika tidak dilakukan intervensi Dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Bangka Belitung diprediksi akan terus mengalami penurunan (*business as usual*) sehingga intervensi kebijakan perlu diambil salah satunya dengan ketersediaan data yang akurat yang disajikan di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPPLHD). Untuk tahun 2020 – 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan untuk pencapaian IKLH sebesar 75,51 tahun 2020 dan 76,39 pada tahun 2024, ada beberapa tantangan kedepan dalam pemenuhan target ini terutama adanya penambahan indikator baru dalam perhitungan IKLH diataranya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang merupakan representasi dari kualitas air laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pengelolaan pesisir dan laut, serta tambahan indikator Indeks Kualitas Gambut. Tantangan kedepan juga terletak pada Kualitas tutupan lahan dan Indeks Kualitas Air (IKA) yang akan terus mengalami penurunan jika tidak dilakukan intervensi pengelolaan lingkungan, sehingga diperlukan aksi nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IV. KONDISI DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan ruang untuk kebutuhan manusia. Penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan mengakibatkan laju penurunan kuantitas maupun kualitas sumber daya alam tersebut akan semakin cepat, dan dikhawatirkan tidak dapat lagi menopang kehidupan manusia di masa datang.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan harus memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah ekologis atau ekoregion. Berdasarkan Daya Dukung



dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama jasa lingkungan penyediaan air terdapat degradasi daya dukung dan daya tampung. Terjadi degradasi penurunan Daya Dukung Dan Daya Tampung yang dapat dilihat dari kenaikan indikatif kelas jasa lingkungan sangat rendah pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2006 dan tahun 1996. Pada Tahun 2016 indikatif kelas jasa lingkungan penyediaan air pada kelas sangat rendah 481.606,76 hektar atau 28,8% dari luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan tahun 2006 indikatif kelas jasa lingkungan penyediaan air pada kelas sangat rendah seluas 390.010,74 hektar atau 23,39 % dari luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Degradasi dan alih fungsi lahan merupakan beberapa penyebab menurunnya jasa lingkungan penyediaan air pada suatu wilayah. Daerah hutan berperan sebagai wilayah atau area konservasi air yang memiliki cadangan air tanah yang tinggi. Hilangnya vegetasi yang terjadi akibat degradasi dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan campuran dan pertambangan menyebabkan terjadinya penurunan jasa lingkungan penyediaan air yang signifikan. Dilain pihak Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk berbagai Jasa Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami penurunan dan membutuhkan berbagai intervensi untuk menjaga penurunan Daya Dukung Daya Tampung seperti Penyediaan Pangan, Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir, Longsor, Jasa Lingkungan pemurnian Limbah.

V. PERUMUSAN ISU PRIORITAS

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dimulai dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja yang susunannya terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait, perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari lembaga masyarakat, serta pembentukan Tim Penyusun Dokumen yang susunan keanggotaannya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Tim



Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen ini dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020.

Tahapan yang dilalui dalam Penyusunan DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun DIKPLHD yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/123F/DLH/2020;
2. Pelaksanaan *Workshoop* Penyusunan DIKPLHD yang diikuti oleh Tim Kelompok Kerja Penyusun DIKPLHD provinsi dan Perwakilan dari kabupaten/kota;
3. Identifikasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan DIKPLHD sesuai pedoman penyusunan yang terbaru;
4. Pelaksanaan FGD ke-1 melakukan perumusan isu strategis daerah serta analisis cepat terhadap data - data yang telah ada dengan metode DPSIR secara singkat, dilanjutkan dengan identifikasi dan penyaringan isu;
5. Pengelompokan isu dan pengolahan isu dengan metode AHP dalam tim internal di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. FGD ke-2 untuk membahas analisis dengan metode DPSIR;
7. Pendokumentasian dan penulisan dokumen IKPLHD;
8. Pengiriman dokumen IKPLHD;
9. Penginputan data ke dalam sistem informasi lingkungan hidup di aplikasi data alam;
10. FGD ke-3 untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen IKPLHD kepada Tim Kelompok Kerja, dan mempublikasikan dokumen IKPLHD Tahun 2019 yang telah tersusun.



Perumusan isu prioritas dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen. Perumusan Isu Prioritas dimulai dengan menyajikan data-data terkait yang telah dikumpulkan kepada Tim Kelompok Kerja serta melakukan analisis cepat terhadap data-data tersebut dengan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response*. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis cepat tersebut peserta FGD mengidentifikasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dilakukan diskusi dan pengelompokan isu-isu tersebut. Hasil pengelompokan isu diolah dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan matriks pairwise comparison untuk mendapatkan isu prioritas yang akan dijadikan isu utama dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dan hasil diskusi bersama Tim Kelompok Kerja Penyusun IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, maka ditetapkan 4 isu prioritas lingkungan hidup daerah, yaitu:

1. **Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal**
2. **Alih Fungsi Lahan**
3. **Banjir**
4. **Degradasi Kualitas Air**

VI. ANALISIS DPSIR

Dalam penyajian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini digunakan analisis *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)* yang memuat hubungan kausalitas dari unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang disajikan dalam BAB II, adapun tinjauan yang di analisis sebagai berikut:



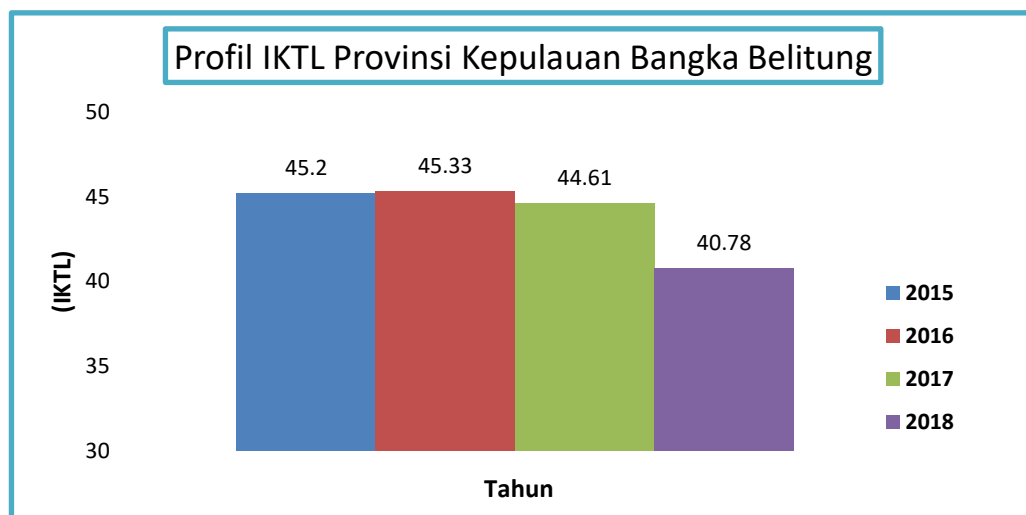
A. Tata Guna Lahan

Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi mineral tambang yang cukup besar, terutama tambang timah. Maraknya kegiatan pertambangan timah yang tidak sebanding dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan, seperti erosi dan sedimentasi yang menyebabkan degradasi lahan, pendangkalan muara sungai, rusaknya ekosistem di darat maupun di laut, serta penurunan kualitas air. Selain akibat pertambangan, kerusakan atau degradasi lahan di Kepulauan Bangka Belitung disebabkan juga karena maraknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan non hutan, seperti menjadi lahan perkebunan atau pemukiman. Alih fungsi lahan hutan ini akan menyebabkan fungsi hutan menjadi terganggu, termasuk fungsi hutan untuk mengatur persediaan air dan udara/oksigen. Alih fungsi lahan hutan ini akan menurunkan fungsi lahan sehingga menjadi tidak produktif lagi. Pertumbuhan Jumlah penduduk yang semakin meningkat selalu berkorelasi dengan jumlah kebutuhan hidup yang jauh lebih besar, seperti kebutuhan makanan dan bahan baku, tempat tinggal, pendidikan, rekreasi/wisata, dan lapangan pekerjaan. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui aktivitas di sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pemukiman, perdagangan, pariwisata, dan infrastruktur sehingga akan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Selain itu karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah pertambangan juga tidak lepas dari permasalahan terkait pemanfaatan ruang dan lahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Alih fungsi lahan yang paling banyak terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 yaitu konversi menjadi lahan perkebunan dengan luasan perubahan mencapai 33.125,48 ha atau setara dengan 92,06 % dari perubahan yang terjadi. Selanjutnya disusul oleh pemukiman yang mengalami peningkatan luasan sebesar 1.758,71 ha atau setara dengan 4,89 % kemudian lahan terbuka penambangan turut mengalami perluasan



kegiatan sebesar 762,75 ha atau setara dengan 2,12 % dari luasan perubahan yang terjadi. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2019 adalah 41,2. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 40,78. Dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2018 terjadi penurunan nilai IKTL secara signifikan yaitu 3,83 sementara antara tahun 2018 hingga akhir 2019 yang justru terjadi kenaikan IKTL sebesar 0,42. Walaupun demikian angka ini masih menempatkan Bangka Belitung dalam kriteria IKTL berada pada kriteria kurang baik.



Gambar.1.2 Profil Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berbagai respons Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus dilakukan untuk meminimalkan degradasi terhadap kualitas lahan diantaranya: Pengendalian Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan-Kebijakan perizinan selain disesuaikan dengan tata ruang yang sudah ada, juga memperhatikan kebijakan baik nasional seperti Peta Indikatif Penundaan Pemberian izin Baru (PIPIB) maupun kebijakan daerah. Terkait mengurangi potensi alih fungsi lahan atau pembukaan lahan yang akan menurunkan tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, penghijauan serta percepatan pelaksanaan reklamasi perusahaan-perusahaan pertambangan, Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan



sebagai pedoman dalam pemberian perizinan serta penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

B. Kualitas Air

Pertumbuhan Jumlah penduduk berkorelasi dengan meningkatnya kebutuhan air dan limbah domestik dari rumah tangga baik limbah cair domestik maupun limbah padat persampahan. Disamping itu pemenuhan ekonomi Bangka Belitung dengan berbagai aktifitasnya terutama aktifitas pertambangan juga berkorelasi dengan penurunan kualitas air. Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 sebesar **76,81** nilai IKA ini dihitung berdasarkan pemantauan kualitas Sungai di 6 Kabupaten dan 1 Kota. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA-NSF) diatas memperlihatkan bahwa untuk 11 sungai yang dipantau kualitasnya sebagian besar masih berada pada klasifikasi baik dan cukup baik. Jika dilihat dari hasil perhitungan IKA-NSF tiap-tiap sungai yang dilakukan pemantauan, kemudian dirata-ratakan maka nilai IKA-NSF Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 76,81 dan jika dibandingkan dengan kriteria baru IKA maka *IKA provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kriteria cukup baik*. Sedangkan Untuk kualitas air laut berdasarakan pemantauan kualitas air laut Bersama KLHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata rata berada pada peringkat *Medium*. Titik pantau pada Pelabuhan Belinyu masuk dalam kategori *Bad*. Hal ini diakibatkan dari aktivitas pelabuhan yang ramai sehingga polutan yang berasal dari aktifitas bongkar muat barang maupun bahan bakar ikut menekan kualitas air laut pada Pelabuhan.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjaga kualitas air diantaranya: melakukan perhitungan beban pencemaran sungai sebagai dasar dan arah kebijakan dalam pengendalian kualitas air, pada tahun 20019 telah dihitung untuk Sungai Buding dan Sungai baturusa; menyusun kegiatan rencana aksi pengendalian pencemaran sungai; meningkatkan pemantauan kualitas



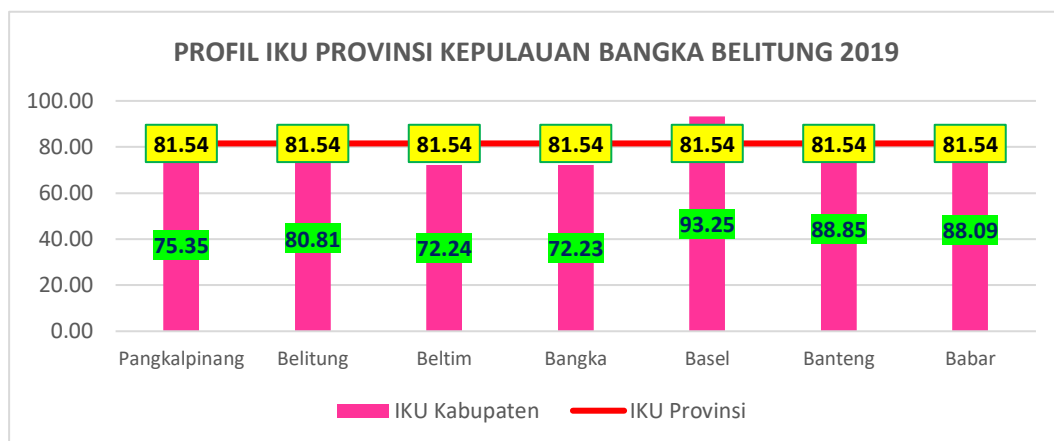
sungai; pengawasan terhadap ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan limbah cair dan membuat Kebijakan daerah untuk pengendalian pencemaran air.

Pada tahun 2019 telah disahkan peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 yang di revisi dengan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha atau /Kegiatan Tambak Udang, serta Pengesahan Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perda No. 3 Tahun 2020 sebagai bentuk respons untuk mengatur pemanfaatan ruang laut sehingga dapat meminimalkan kerusakan pesisir dan laut yang tentunya berkorelasi dengan kualitas air laut.

C. Kualitas Udara

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan laju penduduk merupakan faktor utama dalam drive terhadap kualitas udara perkotaan. Aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup berupa transportasi dan energi telah menghasilkan efek samping berupa emisi sisa pembakaran yang masuk ke dalam udara ambien, sehingga mutu udara ambien akan turun kedalam tingkatan tertentu yang mengakibatkan udara ambien tidak dapat lagi memenuhi fungsinya. Kegiatan transportasi merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia. Pola penggunaan kendaraan pribadi menjadi aktivitas rutin yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pemantauan kualitas udara yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara umum kualitas udara yang dihitung dalam Indeks Kualitas Udara untuk masing-masing kabupaten dan kota masih dalam kondisi baik. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten dan kota dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi. dengan metode manual aktif portable. Pada tahun 2019 IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 81,54.





Gambar 1.3 IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai bentuk respons dalam pengendalian pencemaran udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan diantaranya: Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak melalui regulasi dan management transportasi, melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha terkait kewajiban pengendalian pengelolaan emisi sumber tidak bergerak dengan mekanisme pengawasan dan kegiatan proper.

D. Resiko Bencana

Pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan serta karakteristik daerah dataran rendah menjadikan faktor pemicu bencana yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian banjir terparah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 11 kejadian banjir dengan korban meninggal 3 orang, luka - luka 4 orang dan terdampak mengungsi sebanyak 25.058 jiwa dan menyebabkan rumah terendam sebanyak 1.672 unit. Sedangkan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan terparah terjadi pada tahun 2018 dengan 73 jumlah kejadian. Berbeda dengan bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi, bencana kebakaran hutan dan lahan sepanjang 10 tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan frekwensi kejadian di tahun 2019. Berdasarkan data dari DIBI 2019, Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan korban jiwa dengan rincian 4 meninggal dan hilang, 2 luka – luka, dan 1.172

mengungsi. Sedangkan kerusakan rumah 2 unit rusak berat dan 296 unit rusak ringan serta 1 unit fasilitas pendidikan rusak akibat banjir.

Berbagai upaya telah dilakukan sebagai bentuk respons diantaranya upaya teknis: Pengerukan sedimen pada sungai dan kolong, optimalisasi program Bank Sampah, pengendalian tutupan lahan di daerah hulu, penyusunan regulasi pembukaan lahan tanpa membakar. Upaya penegakan hukum dan kajian diantaranya: penertiban izin – izin tambang illegal, optimalisasi pengawasan dan pengendalian kesesuaian tata ruang, Penyusunan kajian / peta rawan bencana, melakukan pembaruan kajian risiko bencana sesuai dengan data terbaru dan berkala, menyusun upaya mitigasi dan adaptasi bencana, upaya edukasi berupa Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, penyadaran masyarakat berperilaku ramah lingkungan, integrasi materi kebencanaan di sektor Pendidikan.

E. Perkotaan

Berbagai faktor pendorong permasalahan perkotaan diantaranya pertumbuhan penduduk, pemenuhan kebutuhan pemukiman dan kegiatan usaha serta pengelolaan limbah domestik belum optimal dan daya tampung TPA yang terbatas. Berbagai faktor pendorong permasalahan lingkungan perkotaan tersebut memicu: Peningkatan timbulan sampah, peningkatan limbah domestik, sampah yang terkelola masih rendah, meningkatkan beban pencemaran air dan limbah, masih rendahnya Pengelolaan sampah disumber serta meningkatnya biaya pengelolaan sampah. Timbulan sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1832,71 m³/hari (Data DIKPLHD Kabupaten/Kota) sedangkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) semakin terbatas seperti Kota Pangkalpinang dengan kapasitas 125.000 m³ sedangkan volume eksisting 95.000 m³, Kabupaten Bangka Barat Kapasitas 115.875 m³ kondisi eksisting 84.290,95 m³. Pertumbuhan penduduk Bangka Belitung sebesar 2,41 % pertahun juga berkorelasi terhadap pemenuhan pemukiman serta meningkatnya limbah cair



domestik. Berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang tergambarkan pada state diatas menimbulkan polusi serta permasalahan persampahan yang tidak tertangani, potensi gas rumah kaca dari sektor limbah, dari sisi ekonomi juga menurunkan estetika dan daya tarik wisata bangka belitung.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan perkotaan, terutama permasalahan persampahan yang dihadapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilakukan berbagai upaya diantaranya: mengoptimalkan kegiatan 3R dan pelatihan composting sampah rumah tangga yang dilakukan di kabupaten dan Kota, dilakukan juga sosialisasi dan pelatihan bank sampah pada tahun 2019 di semua kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk kebersihan sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi Program ADIWIYATA tingkat Provinsi berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dikeluarkan berbagai Intruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk meminimalisasi sampah plastik dan limbah domestik, selain itu dilaksanakan *MOU* antara PLN dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pemanfaatan sampah menjadi pellet untuk pembangkit listrik PLTs sebagai bentuk inovasi baru. Kegiatan *Coastal Cleanup* pada tahun 2019 juga dilaksanakan di semua kabupaten kota dalam rangka pembersihan pantai dan pesisir dari sampah plastik.

F. Tata Kelola

Berbagai upaya dalam perwujudan tata kelola pengelolaan lingkungan Keberadaan nilai-nilai kearifan lokal, perizinan di bidang lingkungan hidup serta penganggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup menjadi *driving force* terhadap terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bentuk respons dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat berbagai kebijakan baik itu Peraturan daerah, peraturan gubernur, melaksanakan peningkatan kapasitas SDM lingkungan serta melakukan



pengawasan lingkungan untuk memastikan keetaatan terhadap regulasi lingkungan hidup.

VII. Inovasi daerah

Peran Inovasi mmenjadi penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 melakukan beberapa inovasi dalam rangka melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Di antara inovasi-inovasi tersebut adalah:

- a. Literasi Lingkungan
- b. Agro Edu wisata dan Pemanfaatan Kolong pasca tambang
- c. Program Pemerhati Lingkungan Babel
- d. Sedekah Pohon.
- e. Penggunaan Kompos Babel yang diberikan pada lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman atau revegetasi.
- f. Bimbingan transplantasi terumbu karang kepada mahasiswa dan masyarakat pesisir untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak atau mati.
- g. Pembuatan Pelet sampah sebagai bahan bakar PLN (gasifier) Energi Baru dan terbarukan
- h. Penangkaran satwa langka sebagai sarana habituasi dan edukasi, serta kampanye kepada masyarakat terkait perlindungan satwa langka di Bangka Belitung oleh komunitas pecinta hewan ALOBI.

VIII. PENUTUP

Berbagai upaya sebagai bentuk respons Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan pada tahun 2019, tentunya keberlanjutan program/kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan harus terus dilaksanakan.



Berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup kedepan perlu diperhatikan berdasarkan analisis data dan respons yang telah dilakukan pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini diantaranya:

- (1) Pentingnya perencanaan pembangunan yang di dasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mempedomani kesesuaian ruang yang diatur dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Peningkatan upaya meminimalkan kerusakan sumber daya air dan peningkatan kualitas air dengan perencanaan yang didasarkan dengan kajian daya tampung beban pencemaran.
- (3) Meningkatkan aksi yang berkelanjutan terkait implementasi minimisasi sampah melalui Gerakan 3 R, Bank sampah serta didukung regulasi persampahan, serta percepatan pembangunan TPA regional.
- (4) Bangka Belitung sebagai Provinsi Kepulauan sangat tergantung kepada potensi pesisir dan lautnya sehingga degradasi pesisir dapat diminimalkan dengan berbagai regulasi dan kebijakan seperti pelaksanaan RZWP3K beserta pengawasannya.
- (5) Indek Kualitas Tutupan Lahan menjadi fokus yang harus menjadi perhatian, pelaksanaan reklamasi serta meningkatkan peran masyarakat dan stakeholder lain seperti swasta perlu ditingkatkan.
- (6) Diperlukan transformasi pemenuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak menggantungkan kepada ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam terutama pertambangan dan mengembangkan potensi lokal daerah seperti perkebunan dan pariwisata kongritnya Bangka Belitung harus mempersiapkan perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan namun menuju perekonomian yang berbasis industri pengolahan dan jasa berdasarkan potensi daerah.